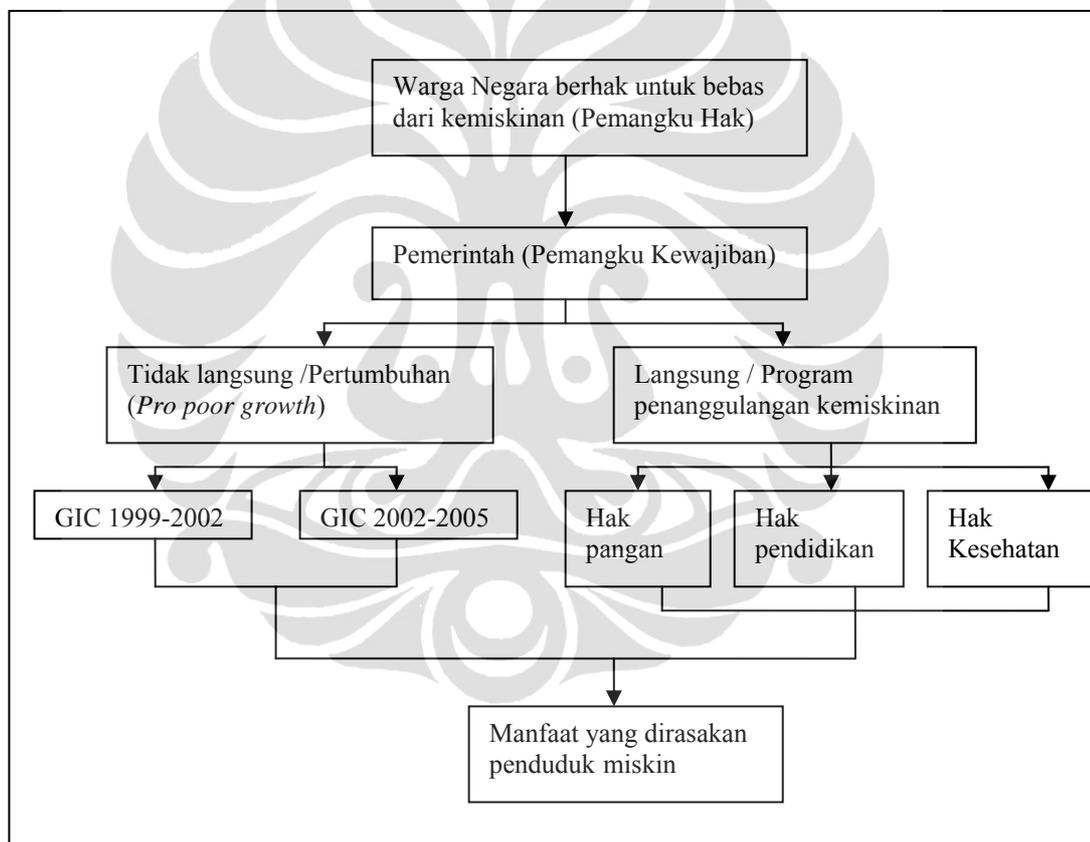


## BAB 3 METODOLOGI

### 3.1. Kerangka Pikir Analisis

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa semua orang (warga negara) mempunyai hak akan penghidupan yang layak dan bebas dari kemiskinan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 H (Ayat 1)<sup>34</sup> dan Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 28 I Ayat (4)<sup>35</sup> dan Pasal 8 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>36</sup> membebankan kewajiban pemenuhan hak kepada pemerintah

Gambar 3.1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian



<sup>34</sup> UUD 1945 Amandemen keempat pasal 28 H Ayat (1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

<sup>35</sup> UUD 1945 Amandemen keempat pasal 28 I Ayat (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

<sup>36</sup> UU NO 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 8 : Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

### 3.1.1. Kuantitatif

#### 3.1.1.1. Mengukur *Pro poor growth*

Pengukuran *pro poor growth* dalam penelitian ini menggunakan *Growth Incidence Curves* (GIC). GIC menunjukkan tingkat pertumbuhan dalam periode tertentu pada setiap percentile yang diurut dari pendapatan atau konsumsi percapita terendah ke tertinggi (Ravallion dan Chen: 2003). Dalam penelitian pertumbuhan dan kemiskinan di Jakarta ini, data yang digunakan adalah tahun 1999, 2002, dan tahun 2005. Dengan demikian pertumbuhan diukur untuk periode tahun 1999 - 2002, 2002 – 2005 dan 1999 – 2005.

$$G_i(ta-tn) = \frac{\text{Konsumsi perkapita}(ta) - \text{Konsumsi perkapita}(tn)}{\text{Konsumsi perkapita}(tn)} \quad (\text{Persamaan 3})$$

$G_i$  : Pertumbuhan konsumsi

$ta$  : Tahun a/tahun awal periode

$tn$  : Tahun n/tahun akhir periode

*Growth Incidence Curve* diperbandingkan dengan garis pertumbuhan rata-rata semua kelompok pendapatan. Jika *Growth Incidence Curve* memotong garis pertumbuhan rata-rata dari kiri atas ke kanan bawah maka pertumbuhan DKI Jakarta pada periode tersebut termasuk *pro poor growth*. Namun jika GIC memotong garis pertumbuhan rata-rata dari kiri bawah ke kanan atas maka pertumbuhan dikategorikan non *pro poor growth* karena persentil penduduk yang pendapatannya lebih besar menikmati pertumbuhan lebih banyak dari pada persentil penduduk dengan pendapatan rendah.

Analisis GIC dilakukan terhadap masing-masing 5 Kota Administrasi yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sehingga akan didapati keseluruhan

gambaran, apakah pertumbuhan perbandingan lurus dengan *pro poor growth* atau sebaliknya, pertumbuhan perbandingan terbalik dengan *pro poor growth*.

Kurva yang dihasilkan dari perhitungan GIC juga akan diperbandingkan dengan tingkat pertumbuhan pada setiap periode di masing-masing Kota Administrasi.

1. Pertumbuhan rata-rata pertahun

$$\check{g}_i = ((\sqrt[3]{b/a}) - 1) \times 100\% \quad (\text{Persamaan 4})$$

Keterangan:

$\check{g}_i$  = Pertumbuhan rata-rata pertahun Kotamadya X pada periode i

a = PDRB harga konstan tahun awal periode i

b = PDRB harga konstan tahun akhir i

2. Pertumbuhan sepanjang tahun

$$G_i = ((b-a)/a) \times 100\% \quad (\text{Persamaan 5})$$

Keterangan:

G = Pertumbuhan Kota administrasi X sepanjang periode i

a = PDRB harga konstan tahun awal periode i

b = PDRB harga konstan tahun akhir periode i

i = (1999 – 2002), (2002-2005)

Untuk menentukan *pro poor growth* suatu periode, analisis tidak berhenti pada bentuk kurva, apakah berbentuk seperti ‘u’ terbalik atau tidak tetapi juga dibandingkan antara 2 periode yakni tahun 1999 – 2002 sebagai periode yang pertumbuhannya rendah, dengan periode 2002 – 2005 sebagai periode yang pertumbuhannya tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran, manakah periode yang paling *pro poor*, periode pertumbuhan rendah ataupun periode pertumbuhan tinggi.

Tujuan akhir dari analisis GIC adalah untuk mengetahui apakah pertumbuhan sebagai salah satu cara pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya yakni pemenuhan hak terhadap warga negara terutama hak untuk bebas dari kemiskinan, adalah benar (*pro poor growth*). Kedua, Atau peningkatan pertumbuhan malah semakin merenggut hak warga Negara untuk bebas dari kemiskinan (*tidak pro poor growth*), dan yang Ketiga, pertumbuhan sangat relative terhadap pengurangan kemiskinan.

### 3.1.2. Kualitatif

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara dengan panduan kuesioner, diskusi kelompok terfokus dan Participatory rural appraisal (PRA) terhadap masyarakat miskin yang tinggal di bawah kolong jembatan M.T. Haryono yang berjumlah 30 KK. Selain itu peneliti juga melakukan *dept interview* (wawancara mendalam) terhadap beberapa orang yang mempunyai informasi kunci mengenai sejarah tempat ini dan berbagai kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ini, seperti ketua RT dan beberapa orang yang telah berada di tempat ini sejak lama.

Keseluruhan metode dipilih untuk memperoleh informasi;

1. Memperoleh informasi apakah kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat diakses oleh penduduk miskin
2. Mengenai manfaat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dirasakan oleh penduduk miskin
3. Mengenai tindakan pemerintah terhadap penduduk miskin baik tindakan positif (memberi bantuan) maupun tindakan negatif (mengancam keberadaan masyarakat miskin yang tinggal di daerah terlarang)

### 3.2. Operasional Variabel dalam model

**Konsumsi pekapita** : rata-rata pengeluaran rumah tangga dalam 1 bulan dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga

**Indeks Harga Konsumen** adalah angka/indeks yang menunjukkan perbandingan relatif antara tingkat harga (konsumen/ eceran) pada saat bulan survei dan harga tersebut pada bulan sebelumnya.

**Inflasi** adalah indikator yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

**Produk Domestik Bruto** adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu.

**Harga Berlaku** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

**Harga Konstan** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

### 3.3. Hipotesis Penelitian

Dalam kerangka pikir analisis digambarkan bahwa, dalam pemenuhan hak warga negara terutama hak untuk bebas dari kemiskinan, pemerintah selaku pemangku kewajiban melakukan dalam 2 cara; secara tidak langsung, yang diukur dengan pertumbuhan dan langsung melalui program penanggulangan kemiskinan.

Hipotesis pertama; cara penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi makro, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tepat karena pertumbuhan tidak dinikmati oleh orang miskin, tetapi lebih dinikmati oleh orang kaya.

Hipotesis kedua; program penanggulang kemiskinan juga tidak tepat sasaran, karena penduduk yang tinggal di daerah terlarang yang merupakan penduduk yang berada di jurang kemiskinan terdalam tidak merasakan manfaat program penanggulangan kemiskinan. Bahkan bukan hanya tidak melakukan pemenuhan hak, pemerintah malah semakin “mempersulit” kehidupan rakyat miskin yang berada di daerah terlarang.

### 3.4. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil Susenas tahun 1999, 2002 dan 2005 terhadap propinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maupun data statistik lainnya.

Data-data sekunder meliputi;

- Konsumsi perkapita
- Indeks Harga Konsumen (1999 = 100)
- PDRB DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 1999, 2002, dan 2005.

Data primer, diperoleh melalui wawancara, *depth interview* dan metode kualitatif lainnya terhadap seluruh keluarga sejumlah 30 yang tinggal di bawah kolong jembatan yang terletak di Jln. M.T.Haryono Cawang, Jakarta Timur. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yakni 30 KK.

### 3.5 Tahapan Analisis data

Untuk melihat manfaat pertumbuhan, apakah lebih dirasakan oleh orang miskin atau tidak digunakan dengan GIC. Kurva yang merupakan hasil dari GIC DKI Jakarta dari masing-masing periode yakni tahun 1999 – 2002 dan tahun 2002 -2005 akan menunjukkan periode mana yang *pro poor growth* dan periode mana yang tidak *pro poor growth*. Selain itu, peneliti juga akan membandingkan GIC periode 1999 – 2002 dan tahun 2002 - 2005 di 5 Kota Administrasi di DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat).

Kurva GIC diperoleh dari data DKI Jakarta yang merupakan hasil dari Susenas Tahun 1999, Susenas Tahun dan Susenas Tahun 2005. Data diolah dengan menggunakan Software STATA untuk mendapatkan tabel nilai konsumsi riil tahun 1999, 2002 dan 2005 untuk masing-masing daerah dan masing-masing

tabel dengan menggunakan (persamaan 3) dan Microsoft Excell akan menghasilkan *Growth Incidence Curves*. Cara pengolahan data sampai menjadi kurva GIC dapat dilihat dalam lampiran.

Kurva GIC dapat dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya :

1. *Growth Incidence Curves* diperbandingkan dengan garis pertumbuhan rata-rata semua kelompok pendapatan. Jika *Growth Incidence Curve* memotong garis pertumbuhan rata-rata dari kiri atas ke kanan bawah maka pertumbuhan DKI Jakarta pada periode tersebut termasuk *pro poor growth*. Namun jika GIC memotong garis pertumbuhan rata-rata dari kiri bawah ke kanan atas maka pertumbuhan dikategorikan *non pro poor growth* karena persentil penduduk yang pendapatannya lebih besar menikmati pertumbuhan lebih banyak dari pada persentil penduduk dengan pendapatan rendah.
2. Jika *Growth Incidence Curves* berbentuk seperti huruf 'U' terbalik maka pertumbuhan DKI Jakarta termasuk *pro poor growth*. Namun jika kurva menunjukkan peningkatan pada percentil akhir maka pertumbuhan dikategorikan *non pro poor growth* karena orang yang pendapatannya lebih besar menikmati pertumbuhan lebih banyak dari pada orang dengan pendapatan rendah.
3. Menggunakan garis trend pertumbuhan. Jika garis trend pertumbuhan mempunyai *slope* positif maka pertumbuhan periode tersebut dikategorikan tidak *pro poor growth*, dimana percentil teratas menikmati pertumbuhan lebih besar daripada percentil dibawahnya. Namun, jika garis trend berslope negatif maka pertumbuhan dikategorikan *pro poor growth* dimana masyarakat dipercepat terbawah menikmati pertumbuhan lebih banyak daripada masyarakat di percentil teratas.

GIC juga akan diperbandingkan dengan tingkat pertumbuhan ( pertumbuhan rata-rata pertahun dan pertumbuhan sepanjang periode) pada setiap periode di masing-masing Kota Administrasi. Hal ini dilakukan untuk

menentukan *pro poor growth* suatu periode, yakni tahun 1999 – 2002 sebagai periode yang pertumbuhannya rendah, dengan periode 2002 – 2005 sebagai periode yang pertumbuhannya tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran, manakah periode yang paling *pro poor*, periode pertumbuhan rendah ataupun periode pertumbuhan tinggi.

Analisis diawali dengan GIC DKI Jakarta untuk memperlihatkan karakteristik pertumbuhan secara keseluruhan. Lalu diikuti dengan analisis Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota Administrasi Jakarta Timur. Analisis masing-masing daerah meliputi; GIC periode 1999 – 2002, GIC periode 2002 – 2005 dan GIC 1999 – 2005.

Untuk melihat program penanggulangan kemiskinan apakah memberi manfaat untuk masyarakat miskin dilakukan dengan metode kualitatif, yakni Observasi, wawancara, *Fokus Group Discussion* (FGD), *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *depth interview* terhadap masyarakat miskin yang tinggal dibawah kolong jembatan Jl. M. T. Haryono yang mulai dilakukan sejak Mei 2008.

Observasi dilakukan beberapa kali dengan mendatangi dan mengamati lokasi penelitian. Observasi penting dilakukan diawal penelitian agar peneliti memahami, memetakan dan memperoleh informasi mengenai karakteristik lokasi penelitian. Informasi yang ingin peneliti dapatkan melalui observasi adalah :

1. Kondisi sarana dan prasarana, akses jalan, fasilitas MCK, fasilitas penerangan, dan fasilitas air bersih.
2. Kondisi sosial budaya, misalnya bahasa (untuk memudahkan dalam membuat kuesioner dan panduan FGD), jadwal aktifitas (untuk memudahkan peneliti dalam menentukan jadwal penelitian, baik penyebaran kuesioner maupun dalam membuat FGD)
3. Sosialisasi agar masyarakat tidak beranggapan bahwa peneliti adalah *outsider* sehingga memudahkan dalam proses penggalan data.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner didesain untuk memperoleh informasi:

1. Identitas responden, pekerjaan, pendidikan, identitas kependudukan dan lama tinggal.
2. Mengidentifikasi pihak yang membantu atau mengganggu keberadaan warga kolong.
3. Pengetahuan warga kolong terhadap program penanggulangan kemiskinan
4. Aksesibilitas warga kolong terhadap program penanggulangan kemiskinan (pangan, pendidikan dan kesehatan)
5. Memperoleh gambaran umum mengenai permasalahan kemiskinan,

FGD dilakukan sebagai *crosscheck* terhadap hasil kuesioner selain itu dalam FGD juga dilakukan metode PRA yakni diagram venn hubungan kelembagaan. Dimana peserta FGD diminta untuk mengidentifikasi, instansi, organisasi yang ada dilingkungan warga kolong. Selain itu, peserta juga diminta menjelaskan kedekatan dan besarnya peranan masing-masing instansi (yang tunjukkan dengan jarak dan besarnya gambar lingkaran suatu instansi terhadap warga kolong).